

May 2007

Agenda dan Tantangan Politik Luar Negeri Bebas Aktif: Sebuah Refleksi Teoretis

Anak Agung Banyu Perwita
President University, info@president.ac.id

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/global>

Recommended Citation

Perwita, Anak Agung Banyu (2007) "Agenda dan Tantangan Politik Luar Negeri Bebas Aktif: Sebuah Refleksi Teoretis," *Global: Jurnal Politik Internasional*: Vol. 9 : No. 1 , Article 5.
DOI: 10.7454/global.v9i1.259
Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/global/vol9/iss1/5>

This Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Social and Political Sciences at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in *Global: Jurnal Politik Internasional* by an authorized editor of UI Scholars Hub.

Agenda dan Tantangan Politik Luar Negeri Bebas Aktif: Sebuah Refleksi Teoretis

ANAK AGUNG BANYU PERWINTA

Abstract

One of the crucial and challenging issues in foreign policy studies, particularly in developing countries, is the understanding of how foreign policies are formulated and why a particular state takes a specific foreign policy decision and action. This article discusses new agendas and challenges such as democratisation, human rights and environmental degradation in Indonesia's foreign policy today. These involve not only the interplay of both domestic/internal and international/external stimuli but also the psychological environment—'existing circumstances as they are perceived by decision makers'—and operational environment—'the conditions of global politics as they exist at any moment in time'. This article argues that due to the complexity in identifying the factors that determine foreign policy-making and influence foreign policy makers, the analysis of Indonesia's foreign policy should be the product of mutual adjustment and coordination of a range of policies. Furthermore, Indonesia's foreign policy should also be the product of independent interactions of the local, national, regional and global interactions.

*"Domestic affairs and foreign relations are intimately linked.
Often both are but different aspects of the same thing"*
(Charles Beard, 1992)¹

*Indonesia's democratic process will be a significant contribution to foreign policy and diplomacy,
in that it will stimulate the country to play a more active regional and international role*
(Hassan Wirayuda, 2004)²

PENGANTAR

Kutipan di atas dengan cukup jelas menunjukkan kompleksitas isu domestik seperti demokratisasi, keamanan kontemporer dan keterkaitannya dengan diplomasi serta politik luar negeri. Tidaklah berlebihan bila berbagai konsep

di atas kemudian menjadi konsep-konsep yang paling sering digunakan dalam tata interaksi umat manusia di dunia ini, khususnya dalam memahami politik luar negeri suatu negara. Konsep-konsep di atas adalah juga konsep-konsep yang paling sering berubah sesuai dengan perkembangan kehidupan sosial manusia

merupakan produk dari globalisasi yang kini sedang melanda dunia. Oleh karenanya, diplomasi dan politik luar negeri RI juga dituntut untuk mahir dalam memainkan perannya.⁵

Kendati pun, prinsip "Bebas-Aktif" akan tetap menjadi roh dalam politik luar negeri kita, sosok dan instrumen politik luar negeri RI cenderung akan berubah seiring dengan perkembangan-perkembangan domestik dan eksternal yang terjadi di lingkungan kita. Selain itu, perubahan rezim pemerintahan yang ditunjukkan dengan kepemimpinan nasional baru, yang dihasilkan dari sebuah proses demokrasi, yang matang akan cenderung merubah pula sosok politik luar negeri RI di masa depan. Menlu Hassan Wirayuda bahkan menyatakan bahwa hal ini dapat meningkatkan kepercayaan diri Indonesia dalam pelaksanaan diplomasi dan politik luar negeri dan memainkan peran yang lebih aktif lagi baik di tingkat regional maupun global.⁶

Dalam tataran konseptual, perubahan rezim pemerintahan yang demokratis akan mendorong terjadinya restrukturisasi politik luar negeri yang lebih positif.⁷ Restrukturisasi ini juga akan memunculkan berbagai implikasinya terhadap stabilitas regional dan internasional. Hal ini dikarenakan orientasi rezim merefleksikan nilai-nilai dasar dan kepentingan ekonomi, sosial dan politik dalam isu-isu yang sedang berkembang di lingkungan domestik dan internasional. Dengan demikian, politik luar negeri yang kita butuhkan di masa depan adalah kebijaksanaan yang handal, *accountable* dan komprehensif sejalan dengan berbagai persoalan multidimensi yang dihadapi

Indonesia.

Selain itu, postur politik luar negeri RI juga harus bersifat proaktif sekaligus adaptif terhadap keterkaitan berbagai persoalan domestik dan internasional. Dengan demikian, politik luar negeri kita akan memunculkan postur yang berimbang antara komitmen pemenuhan kebutuhan domestik dan kewajiban nasional dalam mengatur hubungan luar negeri RI yang lebih sehat dan dinamis.

Tabel 1.1 Keterkaitan Isu Keamanan dan Politik Luar Negeri

		Source of the Security Threat	
		Military	Military, Non-military, Both
States	National Security (Conventional realist approach to security studies)	Redefined Security (e.g., environmental and economic [cooperative or comprehensive] security)	
		Foreign Policy Issues	
Societies Groups, and Individuals	Intrastate Security (e.g., civil war, ethnic conflict, and genocide)	Human Security (e.g., environmental, democratization and economic threats to the survival of societies, groups, and individuals)	

Postur politik luar negeri RI di masa depan juga harus mampu mencerminkan kemampuan menyampaikan pesan ke dunia internasional bahwa Indonesia senantiasa menjalankan kebijaksanaan

baik dalam tataran lokal, nasional maupun global.

Dalam berbagai literatur disiplin ilmu Hubungan Internasional, berbagai konsep di atas kini mendapat sorotan tajam sejalan dengan berbagai perubahan yang terjadi baik dalam konteks lokal, nasional maupun global. Perubahan secara substansial yang terjadi di lingkungan internasional/global diawali dengan berakhirnya Perang Dingin, mengemukanya arus globalisasi (baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial-budaya dan keamanan) dan demokratisasi. Dalam lingkup nasional dan lokal, maraknya konflik antar etnis dan ikatan primordial di berbagai belahan dunia telah memunculkan dampak mendalam bagi proses demokratisasi, keamanan dan politik luar negeri suatu negara.

Berbagai perkembangan faktual di atas, tentunya, membawa konsekuensi yang sangat besar terhadap kebutuhan untuk mendefinisikan kembali ketiga konsep di atas. Lebih jauh, kondisi di atas juga akan berdampak bagi perumusan politik luar negeri dan pelaksanaan diplomasi. Pertanyaannya kini, bagaimana kita dapat memaknai dan mencermati demokratisasi, keamanan serta keterkaitannya terhadap politik luar negeri RI?

Dalam konteks Indonesia, kompleksitas isu domestik (seperti demokratisasi, pembangunan ekonomi dan keamanan yang begitu rumit dan bersifat multidimensional) juga tercermin dalam politik luar negeri RI. Secara lebih spesifik, isu-isu tradisional seperti konflik antar negara dan perang serta isu-isu non-

tradisional berupa isu terorisme, lingkungan hidup, pembangunan ekonomi, HAM dan demokratisasi berburai dan menambah kompleksitas isu yang harus diatasi, dan juga melibatkan aktor-aktor negara dan non negara yang pada gilirannya akan mempengaruhi sumber, kapabilitas dan instrumen politik luar negeri.³ Berbagai Isu-isu di atas juga tidak dapat dilepaskan dari karakteristik geografis Indonesia dan perkembangan-perkembangan yang terjadi di lingkungan eksternal kita.

POLITIK LUAR NEGERI RI: AGENDA DAN TANTANGAN

Dalam konteks global, fokus utama pencapaian keamanan telah menuntut perubahan-perubahan-perubahan agenda pembangunan (nasional dan internasional). Hal ini dikarenakan isu yang sedang marak di suatu negara akan menjadi hirauan bagi aktor-aktor negara dan non negara lainnya. Dengan demikian, semua pihak dituntut untuk "menuruti" agenda global dalam menyusun prioritas kebijakan nasional dan politik luar negerinya. Dalam konteks ini, *interventionism* dalam politik luar negeri Indonesia juga tidak dapat dihindari. Hal ini tercermin misalnya dalam isu GWOT (*Global War on Terrorism*) yang dilakukan oleh AS.⁴

Beberapa prioritas kebijakan yang kini menjadi agenda global: penyebaran demokrasi, perlindungan HAM, pencegahan; penyelesaian konflik komunal, ketidakamanan ekonomi yang diakibatkan oleh pasar bebas, dan menurunnya daya dukung lingkungan hidup. Semua agenda diatas pada dasarnya

yang berimbang dalam penciptaan keamanan, demokrasi, penghormatan HAM, dan kesejahteraan segenap rakyatnya. Tingkat respon politik luar negeri yang begitu tinggi terhadap berbagai perubahan domestik dan internasional menjadi prasyarat utama bagi pencapaian kepentingan nasional. Secara konseptual, para pembuat keputusan politik luar negeri RI patut secara lebih seksama mengkombinasikan *'disruption from below'* atau segala masukan dari masyarakat luas mengenai berbagai isu

dalam perumusan dan pelaksanaan politik luar negeri dengan *'derailment from above'* yang bermakna sebagai beragamnya kepentingan para aktor pemerintah dalam pembuatan dan pelaksanaan politik luar negeri.⁸ Sebaliknya, ketidakmampuan negara dalam mengkombinasikan kedua pendekatan di atas hanyalah akan memunculkan *'boomerang effect'*⁹ yang akan semakin melemahkan diplomasi dan politik luar negeri Indonesia di kancah internasional.

Tabel 1.2. Indonesia's "Bebas Aktif" Foreign Policy:¹⁰

	SUHARTO	HABIBIE	A. WAHID	MEGAWATI
DOMESTIC ENVIRONMENT	<ul style="list-style-type: none"> limited Democracy Trilogy of Dev. State/regime Security 	<ul style="list-style-type: none"> Social unrest Economic crisis Transitional power. Democratic transition Success of election Threat of Separatism (E.Timor,Aceh,Papua) 	<ul style="list-style-type: none"> Economic. Crisis Euphoria democracy Regional Autonomy Threat of Separatism (Aceh,Papua) 	<ul style="list-style-type: none"> More democratic Economic improved First direct pres. election Threat of Separatism (Aceh,Papua)
INTERNATIONAL ISSUES	<ul style="list-style-type: none"> Cold War 	<ul style="list-style-type: none"> Asia economic crisis Trade Liberalization Humanitarian Intervention 	<ul style="list-style-type: none"> Dem,HR,Env. Trade Liberalization Humanitarian Intervention UN Reform 	<ul style="list-style-type: none"> War on terrorism Islam and the West Dem,HR,Env. Trade Liberalization UN Reform
FOREIGN POLICY OBJECTIVES	<ul style="list-style-type: none"> Ec devment Regional stability and security 	<ul style="list-style-type: none"> Rally int. support for Economic recovery. Int'l support on democratic election 	<ul style="list-style-type: none"> Territorial. integrity Economic recovery Dem. consolidation Indonesian image Ecumenical FP 	<ul style="list-style-type: none"> Territorial. integrity Economic recovery (IMF) Indonesian image Total Diplomacy Concentric circles formula (ASEAN, Pacific, East Asia)
KEY ACTORS	<ul style="list-style-type: none"> President Sec/Military Minister of Foreign Affairs 	<ul style="list-style-type: none"> President Minister of Foreign Affairs 	<ul style="list-style-type: none"> President 	<ul style="list-style-type: none"> President Minister of Foreign Affairs Parliament Press & Civil society (Epistemic Community)
MILESTONES	<ul style="list-style-type: none"> Est of ASEAN Est. APEC Est of ASEM New Dipl.rel with PRC NAM summit 	<ul style="list-style-type: none"> Success of election Independent of E.Timor US mil.embargo Act of 37/1999 on Foreign Relations 	<ul style="list-style-type: none"> Get int'l support for territorial integrity MOU Humanitarian Cessation in Aceh West Pacific Forum Ind.mission office in Dili & vice versa Ina-PRC-India axis Bilateral RI-EU Unfocused FP agenda. 	<ul style="list-style-type: none"> New pattern of rels with US ASEAN Community INTERMESTIC Concept 'Principled Pragmatism' Internal reform of MOFA Spokesperson MOFA

Sementara itu, secara faktual, perjalanan politik luar negeri Indonesia dari era Soeharto hingga Megawati Soekarnoputri

dapat digambarkan dalam tabel di atas: Dari tabel di atas kita dapat melihat bahwa pada masa Soeharto – sebagaimana

dijelaskan MacIntyre – pembuatan kebijakan sangatlah “negara-sentris” (*state-centered*). Alhasil, kemungkinan bagi aktor ekstra-negara (*extra-state actors*) seperti masyarakat misalnya, untuk memainkan peranan besar dalam formulasi kebijakan sangat terbatas¹¹. Hal ini terutama akibat diterapkannya dua strategi utama rezim Soeharto: inklusionari, bertujuan untuk mengkooptasi masyarakat luas ke dalam partisipasi kondisional di dalam proses politik domestik yang secara umum dikendalikan negara; eksklusionari, berusaha untuk mengurangi bahkan menghilangkan peranan masyarakat dalam mempengaruhi komunitas politik luas melalui penindasan politik.

Secara konseptual, di masa Soeharto, politik luar negeri Indonesia dapat didekati dengan “pendekatan statis”. Pendekatan yang terkait erat dengan teori Realis ini mengasumsikan bahwa “biasanya para pembuat kebijakan mempunyai otonomi untuk memformulasikan politik luar negeri bebas dari pengaruh-pengaruh sosial”¹². Dengan kata lain, negara diasumsikan lebih kuat daripada masyarakat sehingga peranan dan pengaruh masyarakat dalam politik luar negeri dapat diabaikan.

Model ini menjelaskan bahwa negara mempunyai otoritas penuh (otonomi institusional)¹³ dalam mengatur hubungan luar negeri mereka dan cenderung untuk mengabaikan peranan masyarakat dalam pembuatan politik luar negeri. Dalam konteks ini, negara menunjukkan peranannya sebagai “kekuatan agensi domestik” (*domestic agential power*)’ atau kemampuan negara untuk membentuk alam domestik dan membangun politik luar negeri dengan relatif lebih bebas dari

hambatan-hambatan struktural sosial domestik¹⁴.

Pada era pasca Soeharto, politik luar negeri yang dijalankan Presiden Habibie lebih cenderung bersifat *incremental* yang pada dasarnya merupakan kontinuitas dari politik luar negeri era Soeharto. Sementara itu, di era Gus Dur, politik luar negeri RI cenderung lebih bersifat *crusader* yang memandang lingkungan eksternal dan domestik sesuai dengan struktur keyakinan yang dianutnya. Pada era Megawati, gaya politik luar negeri RI cenderung bersifat pragmatis yang dilandasi pada keinginan untuk merespon situasi yang dihadapinya.¹⁵

Lebih jauh, politik luar negeri pada era pasca Soeharto dapat didekati dengan “pendekatan *societal*”. Berlawanan dengan pendekatan pertama, “pendekatan *societal*” mengasumsikan bahwa kelompok-kelompok masyarakat dalam negara memainkan peranan penting dan berkelanjutan dan politik luar negeri. Pendekatan ini terdiri dari dua model: pluralis dan blok sosial. Model pluralis berdasar pada asumsi bahwa “para pemimpin politik sangat ingin menjaga tingkat dukungan domestik yang tinggi” yang merupakan “syarat utama untuk menjaga dan memaksimalkan”¹⁶ pengaruh mereka dalam dan pada pembuatan keputusan politik luar negeri. Sedangkan model blok sosial melibatkan peranan pers, organisasi non-pemerintah dan kelompok-kelompok lain dalam masyarakat sebagai kelompok penekan dalam mengendalikan, bahkan mengarahkan permasalahan dan substansi pembuatan politik luar negeri.¹⁷ Selain itu, karakteristik lain dari politik luar negeri Indonesia juga dapat diteropong

melalui "pendekatan trans-nasional" yang menekankan adanya sebuah masyarakat global. Pendekatan ini mengasumsikan bahwa "kelompok-kelompok masyarakat dengan tujuan dan kepentingan yang serupa (bahkan sama) akan membentuk koalisi-koalisi politik yang melampaui batas-batas wilayah"¹⁸. Jaringan kerjasama ini lalu akan mendorong isu-isu yang harus dipertimbangkan aktor politik luar negeri dalam formulasi kebijakan mereka. Tujuan dari masyarakat trans-nasional dapat berbeda-beda, dari transformasi rezim tertentu (untuk melawan rezim otoriter), mediasi dan menyelesaikan konflik internasional (konflik di semenanjung Korea), meletakkan isu-isu baru dalam agenda global (isu lingkungan) dan merubah nilai, standar dan norma global (demokratisasi dan hak asasi manusia).

Lebih jauh lagi, ada dua tipe tujuan politik domestik yang juga dapat dicatat dalam politik luar negeri Indonesia¹⁹ yakni: membangun koalisi-koalisi politik dan mempertahankan kekuatan politik. Konsekuensi pertama mengasumsikan bahwa para pembuat politik luar negeri "perlu membangun dukungan domestik untuk semua inisiatif kebijakan luar negeri yang diajukan"²⁰. Membangun koalisi politik memainkan peranan penting dalam politik luar negeri negara-negara Dunia Ketiga karena interaksi antara dukungan domestik dan politik luar negeri adalah salah satu nilai utama dalam postur politik domestik mereka.

Sebagaimana dicatat oleh Hagan, signifikansi "membangun koalisi kebijakan" juga disebabkan oleh kenyataan bahwa "banyak pemerintahan negara

Dunia Ketiga pada dasarnya cukup kompleks secara institusional" dan rezim politik mereka "didominasi oleh seorang pemimpin yang sangat dominan (*predominant leader*) tetapi sebenarnya terpecah belah oleh perseteruan politik antar berbagai faksi politik yang saling bersaing"²¹. Oleh karena itu, keputusan-keputusan politik luar negeri menjadi "resultan politis" yang mencerminkan "strategi-strategi politik yang dibutuhkan untuk membangun kesepakatan" dengan struktur domestik "untuk mendukung pelaksanaan sebuah kebijakan"²².

Pada konsekuensi politik domestik kedua, keputusan politik luar negeri "harus disesuaikan sehingga ongkos domestiknya menjadi lebih rendah"²³. Hal ini terutama karena "mempertahankan kekuasaan politik" biasanya didasarkan pada "nilai untuk mempertahankan posisi kepemimpinan"²⁴. Jadi agar dapat bertahan dalam posisinya, seorang pemimpin nasional, yang menghadapi oposisi domestik signifikan dari struktur domestik yang lebih luas, butuh menaikkan persepsi publik terhadap isu-isu politik luar negeri. Di kebanyakan politik luar negeri negara-negara Dunia Ketiga, mempertahankan kekuatan politik adalah tema yang lebih dominan dibandingkan dengan membangun koalisi-koalisi.

Beberapa model teoritis diatas menjadi sangat penting untuk menjelaskan bagaimana politik domestik, terutama makin meningkatnya tuntutan elemen-elemen tertentu dalam masyarakat dan persaingan kepentingan dan kekuasaan antara negara dan masyarakat, mempengaruhi perilaku politik luar negeri.

Hal ini terutama karena “perilaku politik luar negeri rezim tertentu akan, dalam situasi tertentu, bergantung pada respon rezim tersebut terhadap kegiatan domestik yang dilakukan masyarakat tertentu pada waktu tertentu”²⁵. Kerangka di atas juga menunjukkan bahwa “pilihan respon dari rezim akan bergantung pada dua kelompok variabel”, yakni “agenda kebutuhan rezim” dan “kemampuan kelompok/masyarakat domestik untuk menghalangi pencapaian agenda tersebut”²⁶. Hal ini karena pada kenyataannya tindakan politik luar negeri sebuah negara adalah fungsi dinamika politik internal kontemporer yang dihadapinya.

Dalam politik luar negeri kontemporer Indonesia, berbagai hal teoritis di atas sangat terlihat tatkala Indonesia di era paska Soeharto harus berhadapan dengan negara-negara Barat (AS) dalam interaksinya yang terkait dengan isu-isu terorisme, Islam dan demokrasi. Dengan kata lain, politik luar negeri Indonesia akan selalu berhadapan dengan pola *‘the balance of threat’*²⁷ baik yang berasal dari lingkungan domestik maupun lingkungan eksternalnya.

Salah satu ilustrasi menarik tentang hal di atas adalah keputusan AS untuk meneruskan kembali program *International Military Education and Training* (IMET) kepada Indonesia. Seperti dinyatakan oleh Condoleeza Rice, Menteri Luar Negeri AS, adalah contoh jelas akan peranan aktor internasional dalam membantu proses demokratisasi, termasuk di tubuh militer, di Indonesia. Keputusan AS untuk meneruskan kembali pendidikan dan pelatihan militer bagi TNI ini juga

merupakan indikator jelas bahwa AS masih membutuhkan perluasan kerjasama politik-militer dengan Indonesia untuk memerangi terorisme internasional.²⁸ Pemerintahan George W. Bush telah berulang kali menekankan pentingnya perluasan kerjasama *counter-terrorism* pasca 11 September dengan Indonesia dalam menangani terorisme.²⁹

Pemerintah tentu menyambut hangat pergeseran kebijakan AS ini untuk membangun kerjasama yang lebih kuat dalam perang global melawan terorisme dengan mengatakan bahwa Indonesia dapat melaksanakan reformasi (militer) dalam kerangka demokrasi. TNI juga melihatnya sebagai gerakan positif dari kebijakan pertahanan dan luar negeri AS terhadap Indonesia. Sementara Juru Bicara Departemen Luar Negeri Indonesia, Marty Natalegawa menyatakan: “..diteruskannya kembali program tersebut mewakili pengakuan akan berbagai perubahan demokratis ekstensif yang terjadi Indonesia dalam beberapa tahun belakangan.”³⁰ Banyak analis melihat bahwa keputusan AS untuk meneruskan bantuan militernya ke Indonesia untuk melatih perwira TNI setelah 14 tahun masa suspensi sebagai pengakuan AS atas usaha pemerintah Indonesia dalam mereformasi sektor politik dan keamanan, terutama TNI.³¹

Di sisi lain, kalangan aktivis hak asasi manusia melihatnya sebagai kemunduran atas keadilan, hak asasi manusia dan reformasi demokratis. John Miller, juru bicara *East Timor Action Network* yang berbasis di New York menjelaskan bahwa pergeseran kebijakan AS terhadap Indonesia adalah sebuah pengkhianatan kepada misi mereka untuk mencari

keadilan dan pertanggungjawaban.³² Reaksi ini sebenarnya tidak terlalu mengejutkan terutama karena proses demokratisasi di Indonesia masih dianggap tidak berjalan terlalu lancar karena berbagai benturan kepentingan berbagai institusi sektor keamanan di Indonesia.

KESIMPULAN

Dari uraian di atas, kita dapat menarik kesimpulan bahwa mengingat perkembangan global yang kini sedang melanda dunia, isu maupun agenda di atas patut dijawab oleh politik luar negeri yang bersifat multidimensional dengan melibatkan multi aktor. Dalam konteks ini, politik luar negeri akan menjadi nakhoda RI dalam pergaulan internasional..

Untuk itu, perlu dibangun kemitraan yang lebih baik lagi dengan semua institusi negara dan aktor non-negara dalam politik luar negeri RI. Pemerintah perlu terus menggalakkan kerja sama dengan aktor non-negara dalam menggali masukan yang berguna bagi perumusan kebijakan luar negeri Indonesia sebagai bagian dari *policy network approach*. Secara lebih spesifik, pendekatan ini sejalan dengan *societal approach*³³ yang merujuk pada semakin besarnya peran dan kontribusi aneka kelompok masyarakat sebagai mitra strategis dalam perumusan dan pembuatan politik luar negeri.

Bahkan dalam kasus-kasus tertentu, kelompok masyarakat berfungsi sebagai kelompok penekan dalam mengontrol dan bahkan mengarahkan isu dan isi (*content*) dalam proses pembuatan kebijakan luar negeri. Hal ini dikarenakan tingkat keterkaitan antara isu-isu domestik dengan politik luar negeri RI dan diplomasi yang kini menjadi semakin kental. Hal ini

sebagaimana dikatakan oleh Menlu Hasan Wirayuda dalam wawancaranya dengan harian The Jakarta Post: *'Every domestic issue has a foreign policy aspect'*.³⁴

Dengan kata lain, politik luar negeri RI harus merupakan produk dari *mutual adjustment*³⁵ dan koordinasi berbagai kebijakan yang dihasilkan beragam aktor (negara pusat dan daerah maupun non-negara). Selain itu, kebijakan ini juga harus merupakan interaksi yang bersifat interdependen yang dihasilkan dari interaksi kebijakan pada tataran lokal, nasional, regional dan global.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Nincic, Miroslav. 1992. *Democracy and Foreign Policy: The Fallacy of Political Realism*. New York: Columbia University Press.
- Hill, Christopher. 2003. *The Changing Politics of Foreign Policy*. Hampshire: Palgrave MacMillan.
- Hagan D, Joe. dalam Rosati, Jerel. *Foreign Policy Restructuring: How Governments Respond to Global Changes*. 1994. Columbia University Press: University of South Carolina.
- Perwita, Anak Agung Banyu. 2006. *Indonesia and the Muslim World: Between Islam and Secularism in the Foreign Policy of Soeharto and Beyond*. Copenhagen: NIAS Press.
- Anak Agung Banyu Perwita, Yanyan Mohammad Yani (2005). *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*. Bandung: PT

Remaja Rosda Karya

Philpott, Simon. 2000. *Rethinking Indonesia: Postcolonial Theory, Authoritarianism and Identity*. London: MacMillan Press.

Skidmore, David dan Valerie M Hudson. 1993. *The Limits of State autonomy: Societal Groups and Foreign Policy Formulation*. Colorado: Westview Press.

Neack, Laura, Jeanne A. Hey K, dan Patrick. J. Haney .1995. *Foreign Policy. Analysis: Continuity and Change in Its Second Generation*. New Jersey: Prentice Hall.

Jurnal

Hagan, Joe D. 2001. "Does Decision Making Matter? Systemic Assumptions vs. Historical Reality in International Relations Theory", Edisi khusus, *Leaders, Groups, and Coalitions: Understanding the People and Processes in Foreign Policy Making*, dalam *International Studies Review*. Vol.3. No.2.

Hermann, Margaret, Thomas Preston, Bahgat Korany, dan Timothy M. Shaw .2001. *Who Lead Matters: The Effects of Powerful Individuals*, dalam *International Studies Review*. Vol.3, No.2.

Skocpol, Theda. "The 'Second Debate' In International Relations: Theory Turned Upside-Down", dalam John M Hobson. 2001. *Review of International Studies*. Vol.27.

Working Paper

Jemadu, Aleksius dan Aknolt Kristian Pakpahan. 2004. *Democratization and Indonesia's Foreign Policy in the Post Soeharto Era*. Bandung: Lembaga Penelitian Unpar.

Novotny, Daniel. 2004. *Indonesia's Foreign Policy: In Quest for the Balance of Threats*.

Paper pada Biennial Conference of Asian Studies Association of Australia ke-15, Canberra, 29 Juni-2 Juli 2004.

Laporan Penelitian

Laporan Penelitian PACIS, UNPAR dan Balitbang Deplu RI. 2002. *Peran Departemen Luar Negeri Dalam menjaga kohesivitas Bangsa: Telaah Terhadap Konsep Integrasi Bangsa*. Bandung.

Surat Kabar

The Jakarta Post, 23 October 2004.

The Jakarta Post, 8 November 2004.

The Jakarta Post, 28 Februari 2005.

The Jakarta Post, 1 Maret 2005.

Kompas, 22 Oktober 2004.

CATATAN BELAKANG

¹ Dikutip dari Miroslav Nincic (1992). *Democracy and Foreign Policy: The fallacy of Political Realism*. New York: Columbia University Press.

² Sebagaimana dikutip dari *The Jakarta Post*, 23 October 2004.

³ Pembahasan teoritis mengenai hal ini lihat misalnya, Hill, Christopher (2003). *The Changing Politics of Foreign Policy*. Hampshire: Palgrave MacMillan, hlm.15-25.

⁴ Lebih jauh mengenai hal ini, dibahas dalam Anak Agung Banyu Perwita (2006). *Indonesia and the Muslim World: Between Islam and Secularism in the Foreign Policy of Soeharto and Beyond*. Copenhagen: NIAS Press.

⁵ Menurut Christopher Hill, secara ideal, setiap negara dituntut untuk dapat mencapai tujuh tujuan politik luar negeri, yakni : (1) protecting its citizen abroad; (2) projecting identity abroad; (3) homeostatis or maintenance of territorial integrity and social peace against external threats; (4) advancing prosperity; (5) making decisions on interventions abroad; (6) negotiating a stable international order; (7) protecting the global commons. Lihat Hill, Christopher (2003).

Hlm. 44-45.

⁶ *Kompas*, 22 Oktober 2004.

⁷ Lihat Joe D.Hagan (2001). Does Decision Making Matter ? Systemic Assumptions vs Historical Reality In International Relations Theory. Dalam *International Studies Review*. Special edition on *Leaders, Groups, and Coalitions: Understanding the People and Processes in Foreign Policy Making*. Vol.3. No.2. hlm.5-46.

⁸ Penjelasan lebih lanjut mengenai dua konsep diatas lihat Miroslav Nincic (1992). *Democracy and Foreign Policy*. New York: Columbia University press, hlm.5-15.

⁹ Konsep ini mengacu pada tindakan aktor domestik non negara dalam sebuah negara (represif) yang menjalin hubungan kerjasama dengan jaringan aktor transnasional yang bertujuan untuk menekan pemerintah negara yang bersangkutan untuk mengubah sikap dan perilakunya yang berkenaan dengan politik luar negerinya. Lihat Anak Agung Banyu Perwita, Yanyan Mohammad Yani (2005). *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya, hlm.157.

¹⁰ Kompilasi dari berbagai hasil penelitian yang dilakukan PACIS Parahyangan Center for International Studies) Unpar dan Balitbang Deplu RI (dari 2001-2002), penelitian yang dilakukan Aleksius jemadu, Aknolt Kristian Pakpahan (2004). *Democratization and Indonesia's Foreign Policy in the post Soeharto era*. Bandung: Lembaga Penelitian Unpar.

¹¹ Dikutip dari Simon Philpott (2000). *Rethinking Indonesia: postcolonial theory, authoritarianism and identity*. London: MacMillan Press. hlm. 71

¹² David Skidmore, Valerie M Hudson. 1993. *The Limits of State autonomy: Societal Groups and Foreign Policy Formulation*. Colorado: Westview Press. hlm.20-21

¹³ Konsep ini dipinjam dari Theda Skocpol, dalam John M Hobson. 2001. The "'Second Debate' In International Relations: Theory Turned Upside-Down", *Review of International Studies*.Vol.27. hlm.395-414

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ Penjelasan konseptual mengenai style kepemimpinan dan keterkaitannya dengan praktek politik luar negeri, lihat misalnya, Margaret G. Hermann, thomas Preston, Bahgat Korany, Timothy M. Shaw (2001). Who Lead Matters: The Effects of Powerful Individuals. Dalam *International Studies Review*. Vol.3, No.2, hlm..83-130.

¹⁶ Skidmore (1993). hlm.10

¹⁷ Hill, Christopher (2003).hlm.187-205.

¹⁸ *Ibid*. hal.14

¹⁹ Laura Neack, Jeanne A. Hey K, Patrick. J. Haney .1995. *Foreign Policy Analysis: Continuity and Change in Its Second Generation*. New Jersey: Prentice Hall. hlm.122-127

²⁰ Skidmore.1993. hlm. 124

²¹ Laura Neack, Jeanne A.K Hey, Patrick. J Haney. 1995. hlm.124

²² *Ibid*. hlm.122

²³ *Ibid*.hlm.124.

²⁴ Lihat Douglas Van Belle. 1993. "Domestic Imperatives and rational models of foreign policy decision making", dalam David Skidmore, Valerie M Hudson. hal.154

²⁵ *Ibid*.hlm..55

²⁶ *Ibid*.hlm..55

²⁷ Lihat misalnya, Daniel Novotny (2004). Indonesia's foreign Policy: In Quest for the Balance of Threats. Paper presented at the 15th Biennial Conference of Asian Studies Association of Australia, Canberra, 29 June-2 July 2004.

²⁸ Lihat "US plans to resume military training", *The Jakarta Post*, 28 Februari 2005.

²⁹ *Ibid*.

³⁰ Lihat "IMET resumption seen as recognition of TNI reform", *The Jakarta Post*, 1 Maret 2005.

³¹ *Ibid*.

³² *Ibid*.

³³ Mengenai hal ini, lihat Hagan D, Joe. 1994. In Rosati, Jerel. *Foreign policy restructuring: how governments respond to global changes*. Columbia University Press: University of South Carolina. hlm.139-140.

³⁴ *The Jakarta Post*, 8 November 2004.

³⁵ Sebagai contoh misalnya, tatkala Deplu berusaha meyakinkan negara-negara di Pasifik Selatan bahwa pemerintah RI memberikan perhatian khusus terhadap kesejahteraan rakyat papua, maka berbagai instansi pusat dan daerah yang bertanggungjawab atas keberhasilan otonomi khusus dan pembangunan ekonomi Papua sepatutnya mendukung diplomasi itu dengan meningkatkan kesejahteraan rakyat papua dan aparat keamanan pada saat yang sama juga tidak mengintensifkan penggunaan pendekatan militer di Papua. Pembahasan mengenai konsep mutual adjustment dan coordination, lihat hasil penelitian PACIS, UNPAR dan Balitbang Deplu RI (2002). Peran Departemen Luar Negeri Dalam menjaga kohesivitas Bangsa: Telaah Terhadap Konsep Integrasi Bangsa. Bandung.